

PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, PENGAWASAN INTERNAL, KOMITMEN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BENGKULU

Rekha Melinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Abstract

This research aims to examine the effect of knowledge, skill, internal supervision, to the accountability of regional financial management areas on the regional work units in Bengkulu city government. Populations used in this research are all OPD Bengkulu City. The research data was obtained through questionnaire given to the Head of Unit, head of financial sub-division, treasurer of expenditure and treasurer of receipt. The result shows that knowledge, skill, internal supervision has a positive and significant effect of the accountability to regional financial management.

Keywords: Knowledge, Skill, Internal Supervision, Organizational, Commitment Accountability Of Regional Financial Management

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses Pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami perubahan pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

Salah satu wujud dari keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah yaitu dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dan berkualitas, karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting yang akan digunakan oleh banyak pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pengetahuan merupakan hal yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mendorong pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan kesiapan karyawan yang berkompentensi dan memiliki pengetahuan di bidang keuangan. Menurut Tuasikal (2007) untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Aidil (2010) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dan akuntabilitas keuangan daerah dan penelitian

Melia (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus dimiliki, hal ini terkait dengan keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Safwan (2014) yang menyatakan bahwa keterampilan berpengaruh terhadap kinerja seseorang dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian Melia (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara keterampilan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan Internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Sejalan dengan penelitian Tuasikal (2006) menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penelitian Melia (2017) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen Organisasi sangat penting dalam fungsi pemerintahan khususnya dalam mengelola uang rakyat yang diamanatkan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya, karena karyawan yang menunjukkan komitmen yang tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam keberhasilan tujuan organisasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan Pratiwi (2014) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menunjukkan komitmen pegawai berpengaruh terhadap kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menguji kembali penelitian yang dilakukan Melia (2017) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan, keterampilan, pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Melia (2017) dalam penelitian ini tidak hanya menguji pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan tetapi pengetahuan dari pengguna anggaran (Kadis/Kepala Badan/Camat), PPK (Kasubag Keuangan), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, dikarenakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, melainkan terdiri dari pengguna anggaran (Kadis/Kepala Badan/Camat), PPK (Kasubag Keuangan), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Selain itu penelitian ini menambahkan satu variabel komitmen organisasi dan perbedaan lainnya adalah objek penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu.

• Persoalan yang muncul di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu adalah:

- Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bengkulu kembali mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lantaran adanya masalah pencatatan yang kurang bagus (www.kupasbengkulu.com).
- Pada tahun 2017, terdapat sejumlah pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu menunjukkan masih ada pejabat tidak paham aturan pengelolaan keuangan daerah (www.bengkulukota.go.id).
- Pada tahun 2017, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan diperkirakan menjadi penyebab tidak tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bengkulu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan, hal ini disebabkan banyak sarjana-sarjana umum tetapi untuk spesifikasi pengelolaan keuangan masih kekurangan (www.kemendagri.go.id).

Selain persoalan diatas, ada beberapa temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2016 yang ditemukan oleh BPK RI, yaitu:

- Terdapat ketekoran kas pada beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bengkulu
- Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada pemerintah Kota Bengkulu Belum Memadai
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berpotensi tidak menguntungkan Pemerintah Kota Bengkulu
- Pencatatan dan Pengelolaan Pajak Hotel Belum Dilaksanakan Secara Memadai.

Selain itu juga terdapat beberapa kelemahan dari sistem pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK RI pada tahun 2016, yaitu:

- Proses Penganggaran Tahun 2016 pada pemerintah kota Bengkulu belum memadai
- Penganggaran dan Realisasi Belanja pada beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Belum Tepat
- Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu belum memadai
- Sistem pengendalian intern atas proses penganggaran, pelaksanaan belanja dan pelaporan pada SKPKD pemerintah Kota Bengkulu Lemah
- Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kota Bengkulu Belum Memadai
- Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Optimal dalam Mendukung Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya kenaikan opini merupakan adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh, Keterampilan, Pengawasan Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan, keterampilan, pengawasan internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca serta diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, Pengawasan Internal, Dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Serta untuk dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah Kota Bengkulu terkait dengan Pengetahuan, Keterampilan, Pengawasan Internal, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Menurut Freeman (1984) teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan atau organisasi bertanggungjawab. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah. Implikasi teori stakeholder dalam penelitian ini adalah pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada stakeholder (masyarakat) dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah setiap pegawai pengelola keuangan daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, komitmen organisasi serta pengawasan internal agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik

2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemegang amanah (agent) kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta benar-benar harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya (PP No 58 Tahun 2005). Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017).

2.3. Pengetahuan

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan (Foster, 2001). Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk memahami serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh pegawai bagian akuntansi di setiap OPD agar dapat menjalankan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan maksimal. Untuk mengukur variabel Pengetahuan menggunakan indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017).

2.4. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Menurut Wahyudi (2002) keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktik. Sedangkan menurut Davis (1994) keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017).

2.5. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan dicapai (Sutedi, 2012). Dengan adanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat membantu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017).

2.6. Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi menurut Weiner (1982) adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Komitmen organisasi yang tinggi merupakan elemen penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap hal – hal yang dipercayakan. Komitmen organisasi dipercaya kuat dan mendukung nilai dan sasaran yang

diharapkan oleh organisasi (Baihaqi, 2012). Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang merujuk pada penelitian Ayu (2014).

2.7. Pengetahuan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah selaku organisasi harus bertanggung jawab kepada masyarakat (stakeholder), bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pegawai Pengelola keuangan harus menyusun laporan keuangan untuk OPD bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak menyesatkan pemakai, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah Pegawai Pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan (Yuliarta, 2013).

Aidil (2010) meneliti tentang pengaruh pengetahuan pengelolaan keuangan daerah terhadap kemampuan menyusun laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan tingginya pengetahuan pengelolaan keuangan daerah maka akan menunjukkan bahwa setiap aparat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Sari dan Ibrahim (2014) menunjukkan bahwa peraturan, pendidikan, pelatihan dan komitmen, serta pendukung lainnya berpengaruh terhadap kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Pratiwi et al (2014) menunjukkan semakin tingginya pengetahuan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kemampuan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Melia (2017) menunjukan bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pengetahuan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta teori-teori yang ada, maka dapat diajukan hipotesis:

H1 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.8. Keterampilan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan teori stakeholder terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah dan para stakeholder. Keterampilan merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh setiap karyawan karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya (Robbins, 2006). Di setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan penggunaan sistem teknologi informasi yang membutuhkan manusia untuk mengendalikan sistem tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pegawai yang terampil dan memiliki keahlian di bidangnya, sehingga dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan menghasilkan laporan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Safwan et al (2014) menunjukan bahwa keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan secara terus menerus maka akan meningkatkan kinerja. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Melia (2017) yang menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan keterampilan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat diajukan hipotesis:

H2 : keterampilan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.9. Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan teori stakeholder dimana pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat (stakeholder). Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan pengawasan internal yang baik.

Tuasikal (2008) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) juga menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmana (2017) yang menunjukkan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, penelitian lain juga dilakukan oleh Melia (2017) hasil penelitiannya yang menunjukkan pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Keuangan Daerah maka dapat diajukan hipotesis:

H3 : pengawasan internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.10. Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam teori stakeholder mengungkapkan bahwa pemerintah bukanlah organisasi yang hanya untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, untuk itu di dalam sebuah organisasi dibutuhkan sebuah komitmen organisasi yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi.

Komitmen adalah suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi menurut Arifin (2012) adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri.

Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan melakukan usaha yang maksimal dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar (Baihaqi, 2012).

Komitmen dari masing-masing pegawai sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dari setiap organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menunjukkan komitmen pegawai berpengaruh terhadap kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengembangan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Komitmen dan Akuntabilitas Keuangan Daerah maka dapat diajukan hipotesis:

H4: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta benar-benar harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya. Pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 dijelaskan sebagai keseluruhan tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017)

3.1.2. Pengetahuan (X1)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk memahami serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya. Setiap pegawai pengelola keuangan harus didukung dengan pengetahuan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, memiliki kemampuan dibidang keuangan, dan mampu memahami logika akuntansi dengan baik, hal tersebut sangat penting dimiliki oleh pengelola keuangan karena setiap pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan akuntansi OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengetahui tata cara pelaksanaan belanja dan mengetahui mengenai laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengukur variabel Pengetahuan menggunakan indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017) yang meliputi: Mengetahui tata cara pelaksanaan belanja, Pelaksanaan akuntansi OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban.

3.1.3. Keterampilan (X2)

Keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam praktek, kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang akan memudahkan dalam mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah akan berkaitan dengan sistem informasi karena sistem informasi merupakan sarana dalam penyelenggaraan proses pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi tersebut membutuhkan kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh pegawai. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017) yang meliputi: Kecakapan, Pengalaman.

3.1.4. Pengawasan Internal (X3)

Pengawasan Internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (PP No 60 Tahun 2008). Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang merujuk pada penelitian Melia (2017) yang meliputi: Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, Kegiatan pengawasan lainnya.

3.1.5. Komitmen Organisasi (X4)

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2007). Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang merujuk pada penelitian Ayu (2014) yang meliputi: Komitmen afektif, Komitmen berkelanjutan, Komitmen normatif.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Bengkulu yang berjumlah 40 OPD. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian berupa lembar pernyataan yang dibagikan kepada responden untuk diisi berdasarkan petunjuk tertentu (Sugiyono, 2012: 25). Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan diolah menggunakan Skala Likert. Skala Likert yang digunakan untuk mengolah data terdiri atas 5 (lima) skala.

3.3. Metode Analisis

Regresi Linier Berganda digunakan, untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pengetahuan, keterampilan, pengawasan internal, dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Persamaan yang digunakan dalam analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X1 = Pengetahuan

X2 = Keterampilan

X3 = Pengawasan Internal

X4 = Komitmen Organisasi

e = Kesalahan perkiraan (Error of Estimation)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Berdasarkan statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki rata-rata aktual (mean) sebesar 4,17 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah tinggi. Variabel pengetahuan memiliki rata-rata aktual (mean) sebesar 4,18 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat pengetahuan pegawai pengelola keuangan sudah baik.

Variabel keterampilan memiliki rata-rata aktual (mean) sebesar 3,88 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat Variabel pengawasan internal memiliki rata-rata aktual (mean) adalah sebesar 3,85 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa pengawasan internal di OPD Kota Bengkulu sudah baik. Variabel komitmen organisasi memiliki rata-rata aktual (mean) sebesar 4,00 berada pada range nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa komitmen organisasi di setiap OPD Kota Bengkulu sudah baik

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4,17	4,551
Pengetahuan	4,18	5,557
Keterampilan	3,88	3,249
Pengawasan Internal	3,85	5,015
Komitmen Organisasi	4,00	5,813

4.2. Hasil Analisis Berganda

Tabel 2 menunjukkan nilai $F = 24,230$ dengan nilai signifikansi sebesar $P \text{ value} = 0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan keempat variabel mampu menjelaskan fenomena bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kota Bengkulu.

Nilai koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) = 0,762. Hal ini mengandung pengertian bahwa 76,2 % variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan (X1), keterampilan (X2), pengawasan internal (X3) dan komitmen organisasi (X4),

Tingkat signifikansi variabel pengetahuan (0,024) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel keterampilan (0,047) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengawasan internal (0,022) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$) maka dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima.

Tingkat signifikansi variabel komitmen organisasi (0,031) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$) Maka dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima

Table 2. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig
Pengetahuan (X1)	0,264	2,409	0,024
Keterampilan (X2)	0,326	2,085	0,047
Pengawasan Internal (X3)	0,233	2,437	0,022
Komitmen Organisasi (X4)	0,258	2,289	0,031
Adjusted R^2		0,762	
F-hitung		24,230	
Sig		0,000	

4.3. Pengaruh Pengetahuan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pengelola keuangan daerah tentang tata cara pelaksanaan belanja, pelaksanaan akuntansi OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai laporan pertanggungjawaban maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini berarti semakin baik pengetahuan yang ada pada masing-masing OPD maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini menegaskan pentingnya pengetahuan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.4. Pengaruh Keterampilan terhadap Akuntabilitas Pengelolaam Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik keterampilan maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterampilan yang baik di setiap OPD dalam hal kemampuan dan pengalaman setiap pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pegawai yang terampil dan memiliki keahlian di bidangnya, sehingga dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan menghasilkan laporan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.5. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik pengawasan internal maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan internal diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih. Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan pengawasan internal yang baik.

4.6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik komitmen organisasi maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen dari masing-masing pegawai sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dari setiap organisasi. Dengan adanya dorongan yang kuat dari dalam diri maka akan lebih meningkatkan individu tersebut dalam bekerja dan mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterampilan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan Internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak pemerintah kota Bengkulu untuk bisa meningkatkan pengetahuan setiap pegawai terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar pemerintah kota Bengkulu dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi dalam penelitian selanjutnya yaitu: Tidak dilibatkannya beberapa OPD di Pemerintah Kota Bengkulu dikarenakan tidak mendapat izin penelitian dari OPD tersebut. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk memaksimalkan penelitian yang dilakukan. :

References

- Aidil, 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi). Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Apriani, Yenni, 2012. Pengaruh Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Aceh. Tesis. Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala.
- Budi, Eli Santoso, 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis. Universitas Lampung.
- Darma, E.S, 2004 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah, SNA VII, Denpasar
- Melia, Rozi, 2017. Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Keterampilan, Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat). Journal Akuntansi Pasca Sarjana. Universitas Syiah Kuala.

-
- Safwan, 2014. Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Journal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Sari, Ibrahim, 2014. Pengaruh Peraturan, Pendidikan, Pelatihan Dan Komitmen Kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Administrasi Pembangunan*.
- Siregar, Liper, 2011, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sektor Publik*. Vol. 8, No. 01 hal 66-88.
- Yuliarta, 2013. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). Universitas Padang.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan